

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah membubarkan gerakan hizbut tahrir di Indonesia dan persepsi para tokoh nasional terkait khilafah dan khilafah versi hizbut tahrir beserta pandangan dari organisasi nahdlatul ulama dan muhammadiyah. Mengetahui sejarah kemunculan hizbut tahrir sampai ke Indonesia dengan menggunakan teori ideologi politik, teori persepsi.

Metode yang digunakan adalah bersifat kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian metode studi kasus kausal (eksplanatif) dan studi kasus deskriptif. Penelitian yang dituliskan oleh penulis sangat cocok menggunakan Metode studi kasus eksplanatif, karena pokok pertanyaannya penelitian ini terdapat dengan *how* atau *why*. Penelitian eksplanatif atau eksplanatori bertitik pada pertanyaan dasar “mengapa”. Sehingga orang-orang merasa tidak puas dengan hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya serta ingin mengetahui mengapa bisa terjadi.

Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah meububarkan gerakan hizbut tahrir Indonesia karena menolak sistem demokrasi dan pemilihan umum. Dan bukan karena pemahaman atau konsep khilafah yang dicap sangat berbahaya bagi negara kesatuan republik Indonesia. Munculnya wacana gerakan hizbut tahrir menegakkan khilafah yang menggantikan sistem demokrasi ke sistem pemerintahan yang syariah secara kaffah menurut Hizbut Tahrir Indonesia, mendorong kekhawatiran rezim Bapak Joko Widodo untuk membubarkan gerakan tersebut. Penelitian ini melibatkan berbagai aktor yang terdiri dari berbagai tokoh nasional untuk menggali akar dari permasalahan tersebut diantaranya : ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Pengamat Politik, Dosen Universitas Padjajaran, organisasi Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah yang dimana para tokoh dan organisasi mempunyai persepsi yang berbeda-beda terkait khilafah dan gerakan hizbut tahrir Indonesia. Ulama kontemporer sudah sepakat bahwa negara Pancasila adalah negara Islam. Nahdlatul Ulama menyebutkan sebagai *Dar al-Sulh* (wilayah perdamaian) dan Muhammadiyah menyebutkan sebagai *Dar al-Ahd wa syahadah* (wilayah kesepakatan dan kesaksian).

**Kata kunci:** Hizbut Tahri Indonesia, Khilafah, Pancasila, Nasionalisme, Persepsi.

## ABSTRACT

This study aims to find out why the government dissolved the hizb ut tahrir movement in Indonesia and the perceptions of national figures regarding the khilafah and khilafah versions of hizb ut-tahrir and the views of the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah organizations. Knowing the history of the emergence of hizb ut-tahrir to Indonesia by using the theory of political ideology, theory of perception.

The method used is qualitative in nature by using the type of research method of casual case studies (explanative) and descriptive case studies. The research written by the author is very suitable to use the explanatory case study method, because the main question of this research is how or why. Explanatory or explanatory research focouses on the basic “why” question. So people are dissatisfied with just knowing what happened and want to know why it happened.

The final results of this study indicate that the reason the government dissolved the Indonesian hizbut tahrir movement was because it rejected the democratic system and general elections. And it's not because the understanding or concept of the caliphate is branded very dangerous for the unitary state of the republic of Indonesia. The emergence of the discourse of the Hizb ut-Tahrir movement declares a caliphate that initiates a democratic system to a sharia-compliant government according to Hizb ut-Tahrir Indonesia. Encouraging the regime of Mr. Joko Widodo to dissolve the movement. This research involves various actors consisting of various national figures to explore the root of the problem, including: Chairman of the Syuro Star Party of the Moon Star Party, Political Observers, Lecturers from Padjadjaran University, Nahdlatul Ulama organizations, and Muhammadiyah where figures and organizations have different perceptions. - different regarding the caliphate and the Indonesian hizbut tahrir movement. Contemporary scholars have determined that the Pancasila state is an Islamic state. Nadhlatul Ulama mentions it as Dar al-Sulh (area of peace) and Muhammadiyah mentions it as Dar al-Ahd wa syahadah (area of agreement and proof).

**Keywords** : Hizb ut-Tahrir Indonesia, chaliphate, Pancasila, Nationalism, Perception.